BAB V

KESIMPULAN

Revolusi di Suriah yang meletus pada maret 2011 adalah bagian dari rentetan A*rab Spring,* sebutan bagi revolusi yang bergejolak di Timur tengah. Pecahnya revolusi tersebut akibat ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap rezim Basaar Al-Asaad dalam menjalankan roda pemerintahannya yang otoriter dan mengekang kebebasan warganya. Tuntutan pengunjuk rasa adalah mundurnya Presiden Bashar al-Assad berikut Partai Baath yang berkuasa. Selain itu, dimungkinkannya hak yang sama bagi kelompok etnis Suriah dan agama, dan kebebasan politik yang luas, seperti kebebasan pers, berbicara dan berkumpul. Suriah tengah berupaya melakukan transisi dari negara otokrasi menuju negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi penuh.

Suriah merupakan Negara yang memiliki sejarah yang kaya dengan pemberontakan dan represi. Di mana pemerintahan minoritas Alawiyin (Syiah) yang berkuasa dengan kekuatan sangat ketat yang didukung militer terus mengendalikan negara. Revolusi yang menimpa rezim Suriah sejak tahun 2011 merupakan pertama kalinya, sejak 42 tahun berlangsung aksi revolusi menentang rezim Hafez al-Assad - ayah dari Presiden Bashar al-Assad. Gambaran politik Suriah dari tahun 1940 sampai awal 1960-an dibentuk oleh kekuatan politik yang saling bersaing. Tentara memainkan peran penting di negeri itu. Di mana perubahan kekuasaan yang ada selalu diwarnai campur tangan militer. Tidak ada perubahan di Suriah yang tanpa

campur tangan militer. Hakikatnya perubahan politik di Suriah adalah perebutan kekuasaan antara elite militer di negeri itu.

Pada Juli tahun 2000, Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan ayahnya, sebulan setelah ayahnya Hafez al-Assad meninggal. Assad senior telah berkuasa memerintah selama tiga dekade di bawah naungan Partai Baath, yaitu partai yang berhaluan sosialis yang didominasi oleh Alawi - sebuah sekte Syiah yang didirikan di Damaskus pada tahun 1947, partai Baath merupakan sebuah pan-Arab yang mengusung: "Persatuan, kebebasan, sosialisme".[96] Setelah dilantiknya Bashar Al Assad sebagai presiden Suriah, Bashar berjanji untuk menjadikan Suriah menjadi lebih modern dan demokratis.[97] Dalam pidato pelantikannya, Bashar pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi pemimpin yang berbeda dari ayahnya. Dalam situs resminya, Bashar menyatakan dia telah membanngun zona perdagangan bebas, mengizinkan lebih banyak koran swasta dan universitas swasta, serta berjuang mengatasi korupsi dan pemborosan yang dilakukan pemerintah. Namun, banyak orang mengatakan bahwa sebagian besar janji Bashar belum terwujud hingga kini meskipun sudah ada sejumlah perubahan dalam pemerintahannya.

Kemudian bermunculanlah kritik dari kalangan intelektual terhadap rezim Assad. Kalangan intelektual menjadi motor kebangkitan gerakan kaum

---

[96] Profil Basyar Al-Assad
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html

[97] Cop cit. sejarah

oposisi yang dikenal sebagai "Spring Damaskus". Walaupun pada awalnya masih bersifat diskusi intelektual, bukan sebuah gerakan protes, namun hal itu menyebabkan kelahiran kembali aktivisme politik di kalangan lapisan intelektual dan profesional. Beberapa dari mereka terus menekan untuk reformasi politik terhadap pemerintah.[98]

Salah satu tokoh yang memeloporinya adalah Suhair al-Atassi, yang mendirikan al-Atassi Forum Jamal. Yang kemudian Forum ini ditutup oleh rezim Assad pada tahun 2005, kemudian digiatkan kembali oleh Ibu Atassi sebagai kelompok diskusi berbasis internet. Pemberontakan di Mesir dan Libya menjadi inspirasi Ibu Atassi dan sesama aktivis hak asasi manusia untuk mencoba mengatur protes publik dalam skala kecil, tetapi para aktivis diserang oleh polisi dan kemudian pada tanggal 16 Maret, Suhair al-Atassi ditangkap selama demonstrasi dan menjadi tahanan politik. Beberapa hari setelah penangkapan itu, muncul kejadian-kejadian telah memicu aksi protes dan memulai siklus penindasan dan pemberontakan yang memiliki potensi untuk melahirkan radikalisasi secara luas di Suriah.

Pemberontakan Suriah meningkat pada 15 Maret 2011. Pemberontakan ini dipengaruhi oleh protes bersamaan di wilayah tersebut (Arab Spring). Tuntutan pengunjuk rasa adalah mundurnya Presiden Bashar al-Assad berikut Partai Baath yang berkuasa. Selain itu, dimungkinkannya hak yang sama bagi kelompok etnis Suriah dan agama, dan kebebasan politik yang luas, seperti kebebasan pers, berbicara dan berkumpul. Suriah tengah

[98] ibid

berupaya melakukan transisi dari negara otokrasi menuju negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi penuh.

Bashar al-Assad, yang berkuasa 12 tahun, dinilai telah menerapkan kebijakan yang memangkas kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat Suriah. Rakyat yang tidak puas pada pemerintahannya melontarkan kritik dan protes, tapi ditanggapi pemerintah dengan sikap-sikap intimidatif semacam: penculikan, penyiksaan, dan penangkapan.[99] Tindakan pemerintah itu lantas menyulut protes warga walaupun ditanggapi dengan represi yang semakin masif oleh pemerintah. Rakyat dibantai dan oposisi terus saja dibungkam dengan cara-cara kekerasan. Rakyat Suriah menuntut dicabutnya Undang-Undang Darurat 1963 yang sangat mengungkung kebebasan warga negara dan media massa. Dan ketika Presiden Bashar al-Assad kemudian mencabut UU Darurat pertengahan April lalu. Rakyat sudah kadung kecewa dan justru berkembang menuntut diri sang presiden mundur. Perlawanan rakyat kian melebar dan kelompok anti-Assad makin membesar dan menyebar ke seluruh Suriah.

Konflik yang sudah berjalan setahun menuntut Presiden Suriah Bashar Al-Assad turun dari kursi kekuasaannya itu telah menimbulkan cara-cara represif sang presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Sehingga banyak negera yang mengecam tindakan Asaad tersebut. Dan yang amat disayangkan adalah situasi tidak menentu di Suriah pun telah mengundang pihak-pihak asing masuk ke dalam arena konflik. Di satu pihak, Amerika,

[99] ibid

negara-negara Liga Arab dan Uni Eropa mendukung oposisi, sementara di sisi lain Rusia, Cina dan Iran adalah pendukung Presiden Bashar Al-Assad. China dan Rusia pernah melakukan penolakan terhadap resolusi yang akan dijatuhkan PBB kepada Suriah. Dewan Keamanan (DK) PBB yang diharapkan dapat menyelesaikan kemelut di negeri itu seperti kehilangan fungsinya.

Oleh PBB gencatan senjata antara kedua belah pihak yang bertikai sebenarnya sudah diberlakukan sejak 12 April 2012, namun aksi kekerasan juga tetap terjadi bahkan ketika tim pemantau PBB masuk ke Suriah. Seperti yang disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon: "Setiap hari kita melihat gambar-gambar yang mengerikan - pasukan menembaki pusat-pusat kota, warga sipil yang tidak bersalah tewas, bahkan anak-anak. Pasukan keamanan menahan dan menyiksa warga dengan kejam." Tak heran jika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mencap PimpinanSuriah Bashar al-Assad itu sebagai sebagai seorang penjahat perang.

Meningkatnya konflik serta banyak jatuhnya korban jiwa dari warga sipil di Suriah menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Suriah merupakan salah satu negara di mana banyak warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana. Dalam konteks Indonesia, sikap Indonesia cukup penting dalam turut serta menciptakan keamanan internasional. Mengingat Indonesia mempunyai visi menciptakan ketertiban dunia sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia merupakan Negara merdeka dan berdaulat senantiasa berperinsip

pada anti kolonialisme, bebas aktif dan selalu mendukung upaya pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan atas pancasila dan UUD 45 sebagai implementasi hasrat dan cita-cita bangsa. Atas perinsip itulah Indonesia turut serta menentang segala bentuk imperialism, kekerasan dan turut serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Terhadap konflik Suriah, Indonesia selama ini menekankan perlu segera dihentikannya aksi kekerasan serta perlu di dorongnya proses politik sehingga aspirasi rakyat Suriah dapat dihormati. Bagi Indonesia, memaknai meletusnya revolusi di Suriah berarti memaknai demokrasi. Bahwa, perkembangan di Suriah, merupakan wujud adanya defisit demokrasi, karena itu penting bagi Suriah untuk menjalankan demokrasi yang sepenuhnya. Sifat-sifat otoriter ataupun dictator sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Revolusi yang terjadi di Suriah adalah upaya rakyat suriah menuntut perubahan menuju sistem demokrasi yang seutuhnya.

Dalam penyelesaian konflik suriah Indonesia mengambil sikap perlu dihentikannya aksi kekerasan terhadap rakyat sipil dan menyerukan diambilnya langkah dialog politik yang inklusif, dalam kerangka penghormatan terhadap kesatuan nasional dan integritas teritorial negara Suriah. Indonesia juga mengajak komunitas internasi-onal untuk mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan masalah di Suriah secara damai. Indonesia juga bersikap tidak menunjukan keberpihakan pada blok yang mendukung pihak rezim ataupun oposisi, maupun tidak mendukung Amerika cs ataupun sekutu Suriah (Rusia, China, Iran).